

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pegertian Akuntansi

Definisi akuntansi seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountants* dalam Riahi (2011:50) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi, dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya”.

Menurut Walter T. Harisson dan Charles T. Horngren yang dialih bahasakan oleh Gina Gania (2011:4) mengemukakan definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

Menurut Rudianto (2012:15) mengemukakan pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Ruang lingkup akuntansi sebagaimana yang dijelaskan oleh definisi di atas tampak seperti terbatas, sebuah perspektif yang lebih luas dinyatakan dalam definisi yang menggambarkan akuntansi menurut Riahi (2011:50) adalah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut”.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:2) pengertian dari laporan keuangan adalah :

“suatu sistem yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu:

“Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas”.

Menurut Munawir (2010:5) pengertian dari laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan”.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:126) tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. “Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
 - a. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan,
 - b. Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya,
 - c. Untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya,
 - d. Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud :
 - a. Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham,
 - b. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan,
 - c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan,

- d. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
- 3. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4. Memberikan informasi yang diperlukan tentang perubahan harta dan kewajiban.
- 5. Mengungkapkan informasi yang relevan yang dibutuhkan para pemakai laporan”.

2.1.2.3 Karakteristik laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan, dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah :

“1. Dapat dipahami

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industry yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.

1. Relevan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas.

2. Dapat dipercaya

Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan andal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan secara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik da basis-basis pengukuran dengan konsisten”.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:3) pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut akan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Menurut Irham Fahmi (2014:3) sebuah laporan keuangan pada umumnya terdiri dari:

“1. Neraca

Neraca meringkaskan proses keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumber daya ekonomis (asset), kewajiban ekonomis (hutang), dan modal saham.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi meringkas hasil dari kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini sering dipandang sebagai laporan akuntansi yang paling penting dalam laporan tahunan. Kegiatan perusahaan dalam periode tertentu mencakup aktivitas rutin atau operasional.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham dalam neraca. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini, kemudian laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya”.

2.1.3 Perencanaan Pajak (*tax planning*)

2.1.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:6) pengertian perencanaan pajak adalah:

“Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Definisi perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Resmi (2003:212)

dapat diartikan sebagai berikut :

“Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Muhammad Zain (2003:67) perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah:

“Tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak”.

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah sebagai berikut :

“perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Jadi, pada dasarnya perencanaan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

2.1.3.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2011:7).

Chairil Anwar (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

“1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. memaksimalkan laba setelah pajak

3. meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus

4. memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :

- a. mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara
- b. melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)”.

2.1.3.3 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:11) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. “Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*).

Kebijakan perpajakan merupakan alternative bagi berbagai sasaran yang hendak di tuju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.

2. Undang-undang perpajakan (*Tax Law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri

Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang”.

2.1.3.4 Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:12) ada beberapa strategi dalam melakukan perencanaan pajak yaitu:

1. *“Tax Saving*
Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance*
Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak .
3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak
Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar
Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan”.

2.1.3.5 Penghitungan Perencanaan Pajak

Isentif pajak diproksikan dengan perencanaan pajak. Berdasarkan penelitian Ulfah (2013), perencanaan pajak pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$TAX\ PLAN = \frac{2010}{2014} \frac{TP_{2014} \cdot PTI - CTE}{5 \cdot TA_{2014}}$$

Keterangan :
TAX PLAN : Perencanaan Pajak
PTI : *Pre-tax income* (pendapatan sebelum kena pajak)
CTE : *Current portion of total tax expance* (beban pajak kini)
TP : Tarif pajak (25%)
TA : Total asset

- *Pre-tax income* (PTI) merupakan pendapatan perusahaan sebelum kena pajak yaitu gross profit sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan jumlah beban-beban perusahaan.
- *Current portion of total tax expance* (CTE) atau beban pajak kini yang merupakan beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tariff pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarakan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi).

- Tariff pajak (TP) yang merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tariff pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Digunakannya tarif presentase 25%, dikarenakan tarif PPH Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak.
- Total asset (TA) yang merupakan jumlah seluruh kekayaan atau asset yang dimiliki perusahaan.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk investasinya dalam rangka meningkatkan labanya (Setiawan, 2009:165).

Menurut Jogiyanto (2011:282) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah sebagai alogaritma dari total asset diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan rasio, kemudian perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah, untuk menghindari laba yang ditahan”.

Definisi ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran Perusahaan adalah dapat menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.

Menurut Kartika (2009:9) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total asset/ total aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan dan digunakan sebagai tolak ukur skala perusahaan”.

Dari beberapa pengertian tentang ukuran perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

2.1.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berbeda sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”

2.1.4.3 Penghitungan Ukuran Perusahaan

Menurut Budiasih (2008:24), ukuran perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

Ukuran perusahaan dihitung dengan *Logaritma natural* dari total aktiva yang dirumuskan sebagai berikut

Rumus :

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{Total Assets}$$

Keterangan : $\ln$: *Logaritma natural*

Lim : Limit

n : Rata-rata total aktiva

Menurut Ikayanti (2005), Ukuran perusahaan dihitung dinyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan diukur dengan natural ($\ln$) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Pengguna total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva yang mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

Selanjutnya menurut Ronald Clapham (1996) dalam Christina Debbynannie (2007) dan Desy (2011), ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah:

1. “Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan pada suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya satu tahun.
3. Total hutang ditambah dengan nilai pasar saham biasa perusahaan yang merupakan jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu atau suatu tanggal tertentu”.

Menteri perindustrian dengan SK No. 13/M/SK-1/1990 tanggal 14 Maret 1990 mengelompokkan perusahaan dengan didasarkan pada nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Kriteria bidang usaha dalam kelompok industri kecil adalah: (a) nilai kekayaan perusahaan seluruhnya tidak lebih dari 600 juta Rupiah, tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditepatinya, (b) pemilik adalah Warga Negara Indonesia”.

Sedangkan ukuran perusahaan yang didasarkan pada total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang diatur dalam ketentuan Bapepam No. 11/PM/1997, menyatakan bahwa :

“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan modal (total asset) tidak lebih dari 100 Milyar Rupiah”.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki asset lebih dari 100 milyar Rupiah ke atas dikelompokkan ke dalam industry menengah dan besar.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa semakin besar nilai total asset, semakin besar pula ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan dapat dikatakan baik, karena perusahaan berusaha keras untuk tetap meningkatkan nilai asetnya

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Laba yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu ukuran kinerja yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi tentang laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan berperan penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Hal inilah yang membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan tindakan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Definisi manajemen laba menurut *National Association of Fraud Examiners* dalam Sri Sulistyanto (2008:49) adalah sebagai berikut :

“Manajemen Laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya”.

Menurut Sulistyanto (2008:6), Manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan “.

Menurut Charles W. Mulford dan Eugene E. Comiskey yang dialih bahasakan oleh Aurolla Saparini Harahap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen Laba adalah upaya untuk memanipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya “.

Ilham Fahmi (2013:279) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut :

“*Earnings managemen* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Belkoui dalam Achmad Daengs (2014:201) menyatakan :

“*Earnings management* adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia da mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu contoh yang mencolok dari akuntansi yang dirancang”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

2.1.5.2 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:63), motivasi manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. *“Bonus Scheme Hypothesis.*
2. *Contracting Incentive.*
3. *Political Motivation.*
4. *Taxation Motivation.*
5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO).*
6. *Initial Public Offering (IPO)”.*

Adapun penjelasan dari motivasi manajemen laba di atas adalah sebagai berikut:

1. *Bonus Scheme Hypothesis*

Kompensasi (Bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja, atau laporan ekuitas berada dibawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, Karena

pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivation.*

Perpajakan merupakan motivasi perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO).*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan go publik belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go publik melakukan

manajemen laba dalam *prospectus* mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

2.1.5.3 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:33-36), ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih.
3. Mencatat pendapatan palsu.
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat.
5. Tidak mengungkapkan semua kewajiban”.

Adapun penjelasan dari cara-cara yang digunakan di atas untuk mempermainkan besar kecilnya laba adalah sebagai berikut:

1. mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada laba sesungguhnya.
2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil daripada periode pendapatan sesungguhnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil daripada periode sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk

periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau lebih kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan investor untuk menjual sahamnya (*management layout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

3. Mencatat pendapatan palsu, upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar dari laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi *investor* agar membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik.
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat, upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current lost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi *investor* untuk menjual sahamnya (*management bayout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
- Mengakui dan mencatat biaya lebih lambat, upaya ini dapat dilakukan dengan mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode

sebelumnya. Hingga biaya periode berjalan menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya. Upaya ini dilakukan untuk mempengaruhi *investor* untuk membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik.

5. Tidak mengungkapkan semua kewajiban, upaya ini dapat dilakukan perusahaan dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi *investor* agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya.

2.1.5.4 Model-model Manajemen Laba

Ada beberapa bentuk manajemen laba menurut Sulistyanto (2008:117), adalah sebagai berikut:

1. *“Taking a bath*
2. *Income minimization*
3. *Income maximization*
4. *Income smoothing”*.

Adapun penjelasan dari bentuk-bentuk manajemen laba di atas adalah sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Dalam bentuk jika manajemen harus melaporkan kerugian, maka manajemen akan melaporkan dalam jumlah besar. Dengan tindakan ini manajemen berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan

kesalahan kerugian piutang perusahaan dapat dilimpahkan ke manajemen lama, jika terjadi pergantian manajer.

2. *Income minimization* (menurunkan laba)

Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya.

3. *Income maximization* (meningkatkan laba)

Dilakukan pada saat laba menurun dengan cara memindahkan beban ke masa mendatang. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.1.5.5 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. “Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan”.

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetris informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah dan lainnya.

2.1.5.6 Metode Pendeteksian Manajemen Laba

Menurut Sulistiyanto (2008:211) secara umum ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba yaitu:

- a. “Model yang berbasis *aggreagate accruals*.
- b. Model berbasis *specific accruals*.
- c. Model berbasis *distribution of earnings after management*.”

Pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba di atas dapat dijelaskan

sebagai berikut:

- a. Model berbasis *aggregate accruals* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionar accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya Dechow, Sloan dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model

Jones yang di modifikasi (*modified Jones model*). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan.

- b. Model berbasis *Specific Accruals* yaitu model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini dikembangkan oleh McNicholos dan Wilson, Pettroni, Beaver dan Engel, Beaver dan McNichols.
- c. Model berbasis *Distribution of Earnings After Management* dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev, Degeorge, Patel dan Zeckhauser serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar *benchmark* yang dipakai.

Perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba

(*income increasing*), dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*) (Sulistyanto, 2008:165).

Metode pendeteksian manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Jones dimodifikasi (*Modified Jones Model*), yang merupakan modifikasi dari Model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discreation* melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling *rebust* (Sulistyanto, 2008:229).

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi manajemen laba (Sulistyanto, 2008:229) adalah:

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TA) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Notasi: TA_{it} = Total Akrual
 N_{it} = *Net Income*
 CFO_{it} = *Cash Flows from Operation*

Langkah II: Nilai total akrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Square* (OLS).

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \frac{1}{A_{it-1}} + \beta_2 \frac{\Delta REV_t}{A_{it-1}} + \beta_3 \frac{PPE_t}{A_{it-1}} + \varepsilon$$

Notasi: TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode t
 A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode t -1
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope untuk perusahaan i pada periode t
 ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t
 PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada periode t
 ε = Error Terms

Langkah III: Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *non discretionary accruals* (NDA).

$$NDA_{it} = \beta_1 \frac{1}{A_{it-1}} + \beta_2 \frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{it-1}} + \beta_3 \frac{PPE_t}{A_{it-1}}$$

Notasi: NDA_{it} = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope untuk perusahaan i pada periode t
 A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode t -1
 ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t
 ΔRec_t = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t
 PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada periode t

Langkah IV: Dengan *discretionary accruals* (DA).

$$DTA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA_{it}$$

Notasi: DTA_{it} = Discretionary Total Accruals perusahaan i pada periode t
 TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode t
 A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode t -1
 NDA_{it} = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t

2.1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai perencanaan pajak dan ukuran perusahaan pengaruhnya terhadap manajemen laba dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Ferry Aditama (2013)	Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba	Variabel yang ditelitinya hanya perencanaan pajak saja. Sedangkan dalam penelitian saya, saya tidak hanya meneliti perencanaan pajak. Periode perusahaan yang digunakan berbeda.	Sama-sama menguji variabel perencanaan pajak agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Yana Ulfah (2012)	Pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba	Variabel yang ditelitinya hanya perencanaan pajak saja. Sedangkan dalam penelitian saya, saya tidak hanya meneliti perencanaan pajak. Periode perusahaan yang digunakan berbeda.	Sama-sama menguji variabel perencanaan pajak agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba.
3.	Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (2016)	Pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.	Variabel yang diteliti yaitu perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan. sedangkan dalam penelitian saya hanya meneliti perencanaan pajak dan ukuran	Sama-sama menguji variabel perencanaan pajak dan ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba.

			perusahaan. periode perusahaan yang digunakan berbeda.	
4.	Santhi Yuliana Sosiawan (2012)	Pengaruh kompensasi, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan <i>earning power</i> terhadap manajemen laba	Variabel yang ditelitinya hanya ukuran perusahaan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda.	Sama-sama menguji variabel ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba.
5.	Gagaring Pagalung (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba.	Variabel yang ditelitinya hanya ukuran perusahaan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda.	Sama-sama menguji variabel ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba.
6.	Halimah Shatila Palestin (2007)	Analisis pengaruh ukuran perusahaan dan mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba.	Variabel yang ditelitinya hanya ukuran perusahaan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda.	Sama-sama menguji variabel ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba.
7.	Ghafara Mawaridi Mazini Tundjung (2015)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Studi empiris pada perusahaan Non Manufaktur	Sama-sama menguji variabel manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu perencanaan pajak dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba untuk menghindari pelaporan penurunan laba dan manajemen laba untuk menghindari pajak yang harus dibayar dalam jumlah yang tinggi serta menghindari dari pelaporan kerugian yang dapat menurunkan minat investor.

1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Jadi dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat memperkecil jumlah laba perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) menyatakan bahwa

perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan dapat meminimalisasi pembayaran pajak dengan mengurangi laba bersih perusahaan guna mendapatkan keuntungan pajak. Dalam Penelitian Anggreani (2013) yang menyatakan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2013) meneliti 26 perusahaan manufaktur untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada tahun 2009 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferry Aditama (2013) yang meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk investasinya dalam rangka meningkatkan labanya (Setiawan, 2009:165).

Menurut Jogiyanto (2011:282) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah sebagai alogaritma dari total asset diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan rasio, kemudian perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah, untuk menghindari laba yang ditahan”.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor pendorong praktek manajemen laba. Menurut Budhijono (2006) semakin besar perusahaan maka akan mendapat perhatian dari banyak pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Perusahaan akan mempermainkan jumlah laba untuk menarik investor agar menanamkan saham pada perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Corolina (2005) menyatakan perusahaan yang berukuran besar cenderung untuk menghindari laba yang berfluktuatif drastis. Laba yang meningkat drastis akan berdampak pada pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, sedangkan laba yang menurun drastis akan memberikan pandangan yang kurang baik. Semakin besar perusahaan maka biaya politik perusahaan juga

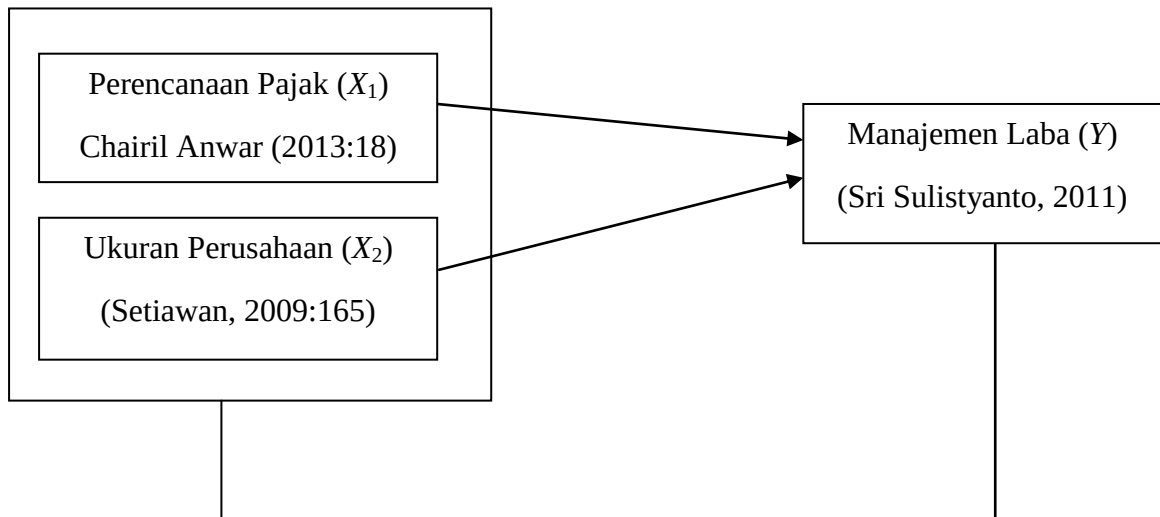
besar, biaya politik muncul dikarenakan probabilitas perusahaan yang tinggi akan dapat menarik perhatian pihak eksternal perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Welvin dan Herawaty (2010) mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herni dan Susanto (2008) serta Handayani dan Rachadi (2009) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dilihat dari jumlah total aktiva perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan tentu memiliki total aktiva yang relatif besar, sehingga dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi serta semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari operasinya. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan alur hubungan antara variabel yang diteliti dalam paradigm sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum ada jawaban empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.

H2 : Terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.